

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Ikhsan Ramadhan¹, Jumansyah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pendidikan politik Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi melalui pengamatan yang dituliskan peneliti dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan berdasarkan teori Grindle yang menjelaskan dua hal yang dapat menentukan berjalannya suatu kebijakan publik yaitu mengenai isi kebijakan (content policy) dan konteks kebijakan (context policy) (Sumaryadi, 2012: 91-92) yang juga sebagai fokus pada penelitian ini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah salah satu unsur pendukung yang memiliki tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis provinsi.

Kata Kunci : *partisipasi, implementasi kebijakan, pendidikan politik, penguatan pendidikan, pemilu*

Pendahuluan

Untuk mewujudkan keadaan ideal bernegara sebagai mana tertuang dalam konstitusi diperlukan adanya pendidikan politik. Pada dasarnya bahwa pendidikan politik dikhususkan untuk menciptakan generasi bangsa yang

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ikhsanr055@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

memiliki kesadaran berpolitik berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara (Kansil, 1996). Dengan pendidikan politik dapat mendorong warga negara untuk ikut andil berpartisipasi dalam kegiatan politik yang bersifat positif. Tentunya pendidikan politik terkait erat dengan sosialisasi politik (Mas'ood, 2011). Adanya proses internalisasi nilai sehingga warga memiliki kesadaran pentingnya partisipasi dalam politik. Bentuk partisipasi politik warga yang dimaksud dapat berupa memilih pemimpin maupun mempengaruhi keputusan politik pemerintah.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan politik khususnya meningkatkan kesadaran dalam memilih pemimpin pemerintahan. Organisasi pemerintah daerah yang salah satu fungsinya dalam memberikan pendidikan politik adalah Badan Kesatuan Politik dan Bangsa (Kesbangpol). Peran Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik warga telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Diharapkan dengan pelaksanaan fungsinya tersebut Kesbangpol dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di daerah.

Tingkat kesadaran berpartisipasi dalam politik di Kota Samarinda masih tergolong rendah. Tahun 2020 Pemilukada tingkat partisipasi warga dalam memilih hanya sebesar 52,26%. kurang dari target sebesar 77,36% (kaltim.antaranews.com). Begitupun pada tingkat provinsi, ditahun 2019 terdapat penurunan dibanding tahun 2014 yang mana jumlah penurunan sebesar 381.102 pemilih (Noor dkk, 2019). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik warga pada pemilihan Kepala Daerah masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi dalam memilih dikarenakan adanya pandangan dari warga kota, bahwa mengikuti pemilu tidak bermanfaat secara langsung bila dibandingkan melakukan aktifitas lainnya (Imam dkk, 2023: 97).

Adapun Kesbangpol Kota Samarinda yang memiliki salah satu fungsi utamanya adalah memberikan pendidikan politik, telah menyelenggarakan kebijakan pendidikan politik dalam usahanya untuk meningkatkan partisipasi politik warga Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dituangkan dalam beberapa program yang meliputi pendidikan politik bagi kaum Wanita (ibu-ibu PKK), kelompok pelajar, juga pelaksanaan pendidikan politik di tingkat kelurahan. Walaupun begitu dengan masih rendahnya tingkat partisipasi warga Kota Samarinda, Kesbangpol belum dapat mencapai target yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik warga melalui pendidikan politik.

Suatu kebijakan perlu menghasilkan output yang jelas dan dampak (impact) yang dapat dirasakan langsung. Output yang dari pelaksanaan kebijakan pendidikan politik adalah meningkatnya jumlah pemilih di Kota Samarinda, sedangkan dampak yang diinginkan adalah mewujudkan warga Kota Samarinda yang sadar pentingnya berpartisipasi dalam aktifitas politik (mengikuti pemilihan umum), dalam jangka panjang melahirkan budaya politik yang partisipatif.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Perlu untuk diketahui bahwa setiap ahli memberikan pengertian yang berlainan terhadap kebijakan publik (public policy) (Winarno, 2011). tetapi untuk membatasi penjelasan secara lebih ilmiah akan dipaparkan beberapa pengertian kebijakan publik dari para ahli yang banyak dikutip oleh ilmuwan pemerintahan.

Kebijakan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, ini seperti yang dikemukakan oleh R. Dye, “what government do, why they do it, and what different it makes” (Dye dalam Agustino, 2017: 15). Pekerjaan tersebut meliputi aspek pelaksanaan tugas pemerintahan seperti pembangunan, pemberdayaan, pelayanan dan pengaturan. Yang mana tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Ini dapat dilihat dari kata “publik” itu sendiri yang dapat dihubungkan dengan segala hal ihwal menyangkut masyarakat luas (Agustino, 2017).

Dye mengatakan jika kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak oleh pemerintah, maka Laswell (1965) memberikan pendapatnya bahwa kebijakan publik terkait erat dengan nilai, tujuan dan praktik pemerintah yang memiliki dampak bagi publik. Dampak disini tentu apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah kebijakan publik diputuskan dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.

Implementasi Kebijakan Publik

Telah disebutkan sebelumnya bahwa implementasi merupakan bagian dari tahapan kebijakan publik. Dalam memahami implementasi kebijakan publik setidaknya terdapat tiga unsur utama yaitu:

1. Proses, yaitu rangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan, yang hendak dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan.
3. Hasil atau dampak, yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran (Sumaryadi, 2012: 88)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hood diperlukan adanya birokrasi yang kuat dan efisien, dimana terdapat para aparatur yang memiliki kepatuhan tinggi terhadap tugas dan aturan yang berlaku, kejelasan informasi yang diperoleh setiap aparatur birokrasi. Adanya pengawasan yang efektif dari pimpinan dalam mengontrol kerja setiap aparatur birokrasi. Terakhir adanya kemampuan yang baik dari pemerintah (birokrasi) untuk mengumpulkan sejumlah sumber daya (uang, SDM, mesin, Sarpras dll) dan memanfaatkannya secara efektif dan efisien.

Partisipasi Politik

Dalam masyarakat yang demokratis adanya penghargaan terhadap prinsip kesetaraan (equality), Dengan adanya kesetaraan warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Warga negara diberikan ruang untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik (Thoha, 2007: 102).

Lebih lanjut kegiatan partisipasi politik oleh warga negara dapat ditunjukkan baik secara konstitusional maupun tidak (Kadir, 2018), secara konstitusional berarti tata laksananya telah diatur oleh undang-undang yang berlaku misal mengikuti kegiatan pemilihan umum sedangkan di luar itu (inkonstitusional) dapat berupa kasus ekstrim seperti revolusi. Konsep partisipasi politik erat kaitannya dengan hak kewarganegaraan. Salah satu filsuf besar Yunani Aristoteles mengatakan bahwa sebagai warga polis dengan kepemilikan hak yang sama harus diberikan ruang partisipasi dalam penyelenggaraan polis (negara). Karena hanya warga lah yang mengetahui duduk persoalan dari setiap permasalahan yang ada dalam polis (Robet, 2021: 49).

Lebih lanjut Huntington (1994) mengatakan terdapat wujud partisipasi politik di masyarakat yaitu yang pertama aktivitas elektoral, dimana adanya keikutsertaan warga dalam pemilihan umum. Kedua aktifitas lobi politik warga dengan elit merupakan bentuk partisipasi. Ketiga keikutsertaan organisasi masyarakat sipil/kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pemerintahan. Kelima partisipasi politik dengan membangun jaringan atau koneksi antara masyarakat dengan elit yang memerintah dan kelima adalah melakukan aksi kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah merupakan bentuk partisipasi tetapi di luar aturan konstitusi.

Pendidikan Politik

Telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Tentunya budaya partisipan penting dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan demokratis tetap terjaga. Oleh karena itulah diperlukan adanya pendidikan dalam merubah budaya politik masyarakat agar lebih berciri partisipatif (Rahman, 2018).

pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai bagaimana sistem politik ideal bekerja. Sehingga masyarakat terdorong secara bersama-sama untuk mewujudkan bekerjanya sistem politik yang ideal tersebut. Dari sini lah masyarakat mempergunakan hak politiknya untuk mempengaruhi jalannya sistem politik sesuai apa yang diidealkan atau dicita-citakan. Selanjutnya Hajer mengatakan bahwa pendidikan politik diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan pentingnya berpartisipasi dalam politik dengan tetap memperhatikan nilai moral/etika (Kartono dalam Hermawan 2020) dengan begitu dapat mewujudkan individu-individu yang bertanggung jawab dalam mempergunakan hak politiknya atau selama mempergunakan kebebasannya untuk berpartisipasi.

Partisipasi Masyarakat

partisipasi pada masyarakat bukan hanya bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan (pengambilan keputusan) tetapi juga partisipasi memiliki peran penting dalam membentuk hubungan yang bersifat saling menguntungkan antara masyarakat sipil dan aktor pemerintah. Masyarakat menuntut segala hal kepada pemerintah untuk mau menyelesaikan persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat, sedangkan elit pemerintah/politik mengharapkan dukungan politik dari masyarakat.

Lebih lanjut mengemukakan terdapat tingkatan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Setidaknya terdapat lima tingkatan utama (Ransbeeck dalam Wasistiono, 2017: 197-198). Tingkat pertama adalah *inform*, pada tingkat ini masyarakat hanya sekedar penerima pasif informasi dari pemerintah dan tidak adanya mekanisme umpan balik.

Tingkat ke dua adalah *consult*, pada tingkat ini telah ada mekanisme umpan balik tetapi lebih bersifat formal saja. Tingkat ke tiga adalah *involve* yaitu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, hal ini dengan cara pemerintah memperhatikan opini publik yang berkembang. Tingkat ke empat adalah *collaborate*, disini masyarakat sipil diberikan kesempatan masuk dalam tim perumus kebijakan publik. Tingkat paling tinggi adalah *empower*, pada tingkat ini masyarakat bukan saja diberikan ruang partisipasi untuk mempengaruhi kebijakan tetapi diberikan kesempatan memberikan veto atas usulan kebijakan walaupun ada lembaga legislatif.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis cermati, seharusnya jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, khususnya studi kasus sebagai fokus utama dan teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan beberapa orang atau kelompok orang. masalah sosial atau kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan penjelasan yang tidak memihak tentang keadaan tertentu.

Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat diadaptasi. Partisipan dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi sumberdata/key informant maupun informant yang akan di mintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian yaitu Analisis Perencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan berdiri sejak tahun 1959 menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur. Secara administratif Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai-Kartanegara dan berbatasan di utara, selatan, timur, dan barat. Secara astronomis, kota Samarinda terletak antara 00°21'81"-1°19'16" Lintang Selatan dan 116°015'16"- 117°024'16" Bujur Timur serta dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa pada garis lintang 00.

Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718 km², dengan wilayah terluas adalah Kota Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Samarinda Kota. Pembagian wilayah Kota Samarinda saat ini terdiri atas 10 kelurahan, 59 kelurahan, dan 1.993 RT (Rukun Tetangga).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda memiliki tugas serta fungsi dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain sesuai arahan Walikota yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun sebagaimana pernyataan dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Pencapaian tujuan tersebut dalam jangka waktu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
2. Terciptanya Pelayanan Prima bagi Masyarakat.

Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam tahun 2021-2026 salah satunya adalah revolusi mental. Arah kebijakan ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 16 tahun 2016 mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental dan ditetapkan tanggal 6 Desember 2016. Revolusi mental ini merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Gerakan Nasional Revolusi Mental mencakup norma, perilaku, serta aspek budaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melalui bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ORMAS dan seluruh elemen masyarakat Kota Samarinda. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk kembali membangkitkan semangat perubahan kemajuan bangsa, berdaulat dalam politik, ekonomi dan sosial budaya.

Isi Kebijakan

Konten kebijakan atau isi dari kebijakan berdasarkan teori Grindle menekankan kepada beberapa hal yaitu kepentingan aktor berpengaruh, manfaat yang diberikan, derajat perubahan dari tujuan kebijakan, pusat pengambilan

keputusan kebijakan, aktor pelaksana kebijakan dan sumber daya yang dimiliki. Seorang aktor memberikan pengaruh paling besar dalam hal memberikan suatu pendidikan, dalam hal ini implementasi pendidikan politik diselenggarakan dan dihadirkan aktor-aktor yang berpengaruh dan berkepentingan sesuai dengan bidang yang akan dijadikan sebagai bahan ajaran atau bahan pendidikan politik. Dari hasil penelitian, penulis menemukan data bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam hal penguatan pendidikan politik cenderung memfokuskan kegiatan untuk menguatkan pendidikan kepada kaum perempuan di Kota Samarinda.

Berdasarkan fenomena difokuskannya kaum perempuan pada penguatan pendidikan politik maka aktor yang memiliki pengaruh juga ditentukan dari kaum perempuan agar bisa mendapatkan kecocokan dalam hal penyampaian pendidikan, dan sosialisasi bisa berjalan dengan baik. Aktor politik dalam artian ini juga tidak serta merta harus berasal dari anggota partai politik maupun anggota legislatif perempuan saja, tetapi Kesbangpol juga turut mengundang akademisi dan pengamat politik dari berbagai kampus di Kota Samarinda, Tujuan Kesbangpol mengundang akademisi dan pengamat politik juga agar peserta pendidikan politik dapat belajar dari banyak sudut pandang sehingga bisa mengembangkan pemahaman politik yang sudah diberikan.

Konteks Kebijakan

Konteks kebijakan dalam teori Grindle meliputi hubungan kekuasaan antar aktor serta strategi pelaksanaan kebijakan, karakteristik dari rezim yang ada, dan adanya kepatuhan dari para pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan kebijakan. Kekuasaan antar aktor serta strategi pelaksanaan kebijakan dalam hal penguatan pendidikan politik oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, dapat dijelaskan mengenai bagaimana hubungan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat seperti diketahui dalam penguatan pendidikan politik diantaranya badan kesbangpol itu sendiri, para rekan kerja kesbangpol sebagai narasumber dan sasaran pendidikan politik yaitu masyarakat. Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda memiliki kepentingan akan peningkatan partisipasi politik bagi masyarakat Kota Samarinda dalam menyambut setiap pesta politik yang akan diselenggarakan. Kesbangpol tentu memiliki peran penting kepada rezim yang akan berkuasa, Pendidikan politik ini bertujuan untuk membuka pandangan masyarakat agar bisa berpartisipasi dengan baik ketika penyelenggaraan pemilu dan tidak asal memilih calon pemimpinnya. Kesbangpol berkepentingan untuk menjalankan pendidikan politik dengan memberikan pandangan-pandangan secara keilmuan politik yang dibantu oleh para narasumber yang kompeten seperti akademisi maupun pengamat politik.

Program dan Kegiatan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dijelaskan untuk menyesuaikan visi dan Misi dari Kota Samarinda

yang dijelaskan dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Visi Kota Samarinda adalah Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban, dengan Misi Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat. Dijelaskan dalam Misi Kota Samarinda salah satunya adalah memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembebasan tindakan korupsi, peran masyarakat dalam hal ini salah satunya dapat diwujudkan ketika masyarakat memiliki pemahaman dan pandangan politik yang baik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepentingan Aktor Berpengaruh, dalam hal ini implementasi pendidikan politik diselenggarakan dan dihadirkan aktor-aktor yang berpengaruh dan berkepentingan sesuai dengan bidang yang akan dijadikan sebagai bahan ajaran atau bahan pendidikan politik. Aktor politik dalam artian ini juga tidak serta merta harus berasal dari anggota partai politik maupun anggota legislatif saja, tetapi Kesbangpol juga turut mengundang akademisi dan pengamat politik dari berbagai kampus di Kota Samarinda, Tujuan Kesbangpol mengundang akademisi dan pengamat politik juga agar peserta pendidikan politik dapat belajar dari banyak sudut pandang sehingga bisa mengembangkan pemahaman politik yang sudah diberikan.

Manfaat yang diberikan, Penguatan pendidikan politik ini bertujuan untuk mewujudkan pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan, serta menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Maksud dari Pelayanan yang prima bagi masyarakat adalah Kesbangpol sebagai salah satu badan pemerintahan harus memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang prima dalam bidang pendidikan politik, sehingga politik tidak hanya dipahami oleh para aktor politik yang menjalankan pemerintahan, tetapi juga membuka cakrawala serta pemahaman politik bagi masyarakat.

Perubahan dari tujuan kebijakan, adanya kebijakan penguatan pendidikan politik memberikan perubahan di kota Samarinda, hal ini dibuktikan ketika pelaksanaan Pemilihan Gubernur di tahun 2018 yang berkisar 549.626 pemilih atau sebesar 58%, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Tahun 2019 di Samarinda mencapai sebesar 72,20% dengan total 449.177 Pemilih. Dari data tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan dari target sebelumnya di tahun 2015 yang hanya mencapai 49%. Peningkatan partisipasi politik ini menjadi bagian dari salah satu konten kebijakan pada poin derajat perubahan dari tujuan kebijakan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan untuk kesbangpol sebagai salah satu badan pemerintahan perlu lebih mengencangkan lagi pelaksanaan pendidikan politiknya tidak hanya ketika mendekati masa kontestasi politik seperti pemilu, dan

pendidikan politik yang diberikan juga tidak hanya mengenai kontestasi politik tetapi juga pendidikan politik dalam hal partisipasi masyarakat akan kinerja pemerintahan, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar menjalankan kebijakan yang diberikan pemerintahan tetapi juga bisa menilai dan memberikan masukan kepada pemerintah apa-apa saja yang perlu diperbaiki khususnya dalam hal politik.

Selain mengadakan pendidikan politik di berbagai kecamatan maupun daerah-daerah tertentu, Penulis menyarankan diadakannya pendidikan politik dengan cakupan yang lebih luas setidaknya setahun sekali dengan bisa mengundang narasumber tokoh nasional dan dengan sasaran peserta pendidikan yang lebih luas lagi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemahaman politik tidak hanya sekedar perpolitikan di pemerintah daerah tetapi juga bisa membuka pandangan politik secara nasional

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. .2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ethridge, Marcus E dan Handelma, Howard. 2016. *Politik Dalam Dunia yang Berubah*. Bandung: Nusamedia
- Habodin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*. Jakarta: Akbar Tandjung institute.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indah, D. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI PERKOTAAN*. uwais inspirasi indonesia.
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadir, Gau. 2018. *Pembangunan Politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kansil. 1996. *Aku Pemuda Indonesia, Pendidikan Politik Generasi Muda*. Jakarta. Balai Pustaka
- MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications Conyer.
- Mas'oed, Mohtar. McAndrews, Colin (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew. B and A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Robet, Robertus. 2021. *Republikanisme: Filsafat Politik Untuk Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Implementasi Kebijakan Program Penguatan Pendidikan Politik Mas.....(Ramadhan)

Sukmajati, Mada dan Mhasun, Muhammad. 2021. Perbandingan Pemerintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Sumaryadi, I Nyoman. 2012. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Thoha, Miftah. 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Wasistiono, Sadu. 2017. Perkembangan Ilmu Pemerintahan: Dari Klasik Sampai ke Kontemporer. Jatinangor: IPDN Press.

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.